

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud***

*The Effect Factor of Accountability in Village Management Fund and the Impact on Fraud Prevention*

**Natalia Lily Babulu**

Natalialilly4@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

### **Abstract**

*This study to predicts factor that affect accountability in managing village funds and their impact on fraud prevention. The specific of this study aim to examine the effect of internal control systems, community participation and apparatus competence on accountability in managing village funds and their impact on fraud prevention. The objects in this study were all village apparatus and village consultative bodies (BPD) of 52 respondents. The method used is the Structural Equation Model (SEM) using WarpPLS 7.0. Result of this study found the evidence that community participation influences accountability in village fund management, apparatus competence influences village fund management accountability, and accountability in village fund management has an influence on fraud prevention. However, this study found doesn't show that effect of internal control system to accountability of village management funds.*

**Keywords:** *Internal control system, Accountability, Fraud.*

### **Abstrak**

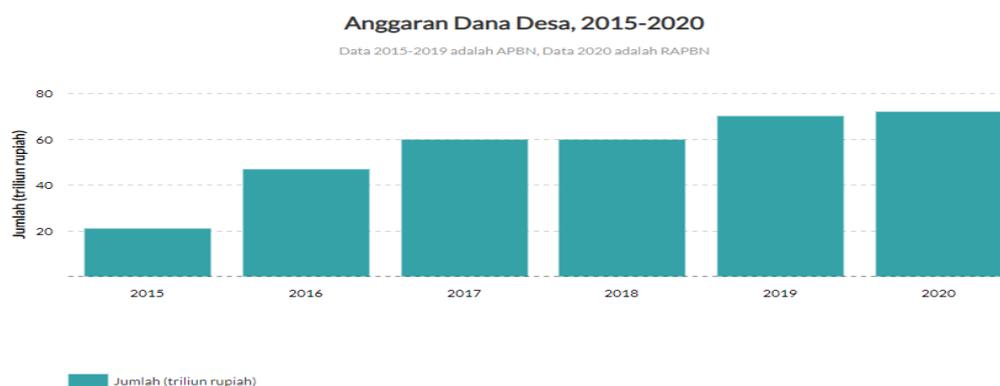
Penelitian ini memprediksi faktor yang bisa mempengaruhi Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa beserta dampaknya terhadap pencegahan *fraud*. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan Kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pencegahan *fraud*. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebanyak 52 responden. Metode yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan WarpPLS 7.0. Penelitian ini menemukan bukti bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Kecurangan.

### **Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan adanya penyaluran dana desa yang nominalnya besar ke masing-masing desa dibutuhkan kompetensi dan pengawasan yang ketat dari masing-masing pemerintah desa dalam pengelolaannya. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya kecurangan yang selama ini ditakutkan oleh pemerintah dan masyarakat (Widiyarta, 2017). Pada gambar 1 dilihat bahwa persentasi untuk anggaran dana desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan demi mewujudkan program pembangunan untuk desa- desa di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia mulai dari tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya dari Rp. 20,8 Triliun pada Tahun 2015, Rp. 47 Triliun pada Tahun 2016, Rp. 60 Triliun pada Tahun 2017 & 2018, Rp. 70 Triliun pada Tahun 2019 dan Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk Tahun 2020 Anggaran Dana Desa akan Mencapai Rp. 72 Triliun.



**Gambar 1 Anggaran dana desa,2015-2020**

Sumber data:Kementerian keuangan, 2020

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. *Indonesia Corruption Watch* ( ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.(kompas.com)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Agar terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Di Indonesia *fraud* lebih dikenal dengan istilah korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, korupsi merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan/*fraud* biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang selama ini ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa (Saputra,2019).

## Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang telah dikembangkan sebelumnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban kuisisioner dari seluruh aparatur Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Sumber data menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah 10 desa di kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu. Sampel pada penelitian ini berjumlah 52 orang yang terdiri dari aparatur desa dan badan Permusyawaratan dese (BPD).

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian survei yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang terdiri dari daftar pertanyaan tersruktur yang ditujukan pada responden. Data diambil pada bulan April s.d Mei 2020.

### Alat Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Partial Least Square* (PLS) yaitu teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan independen berganda dengan alat analisis yang digunakan adalah WarpPLS. Metode SEM didasarkan pada hubungan kausalitas, yakni terjadinya perubahan pada satu variabel berdampak pada perubahan variabel lainnya.

PLS merupakan salah satu metode statistika *Structural Equation Model* (SEM) berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*), dan multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Seperti dinyatakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali (2014) PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama), sample tidak harus besar (Ghozali, dkk 2014).

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari :

1. *Inner Model*, yang kadang disebut juga dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

2. *Outer Model*, sering disebut juga (*outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS.
3. Mengkonstruksi diagram jalur, dalam menggambar diagram jalur (*path diagram*) Falk dan Miller (1992) merekomendasi untuk menggunakan prosedur *nomogram reticular action modeling* (RAM) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Konstruksi teoritikal (*theoretical constructs*) yang menunjukkan variabel laten harus digambar dengan bentuk lingkaran atau bulatan elips (*circle*).
  - b. Variabel observed atau indikator harus digambar dengan bentuk kotak (*squares*).
  - c. Hubungan-hubungan asimetri (*asymmetrical relationships*) digambarkan dengan arah panah tunggal (*single headed arrow*).
  - d. Hubungan-hubungan simetris (*symmetrical relationship*) digambarkan dengan arah panah double (*double headed arrow*).
4. Melakukan Estimasi. Estimasi parameter pemodelan SEM dengan pendekatan PLS diperoleh melalui proses iterasi tiga tahap dengan menggunakan *Ordinary Last Square* (OLS) yaitu sebagai berikut :
  - a. Tahap pertama, menentukan estimasi bobot (*weight estimate*) untuk menetapkan skor atau menghitung data variabel laten.
  - b. Tahap kedua, menentukan estimasi jalur (estimasi untuk *inner* dan *outer* model) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi *loading* antara variabel laten dengan indikatornya.
  - c. Tahap ketiga, menentukan estimasi rata-rata dan lokasi parameter untuk indikator dan variabel laten.
5. Melakukan evaluasi *goodness of fit*. Evaluasi *goodness of fit* model struktural diukur dengan melihat nilai koefisien parameter dan melihat nilai  $R^2$  yang diperoleh pada setiap variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. (Ulum et al, 2014).
6. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menguji hubungan antar variabel. Dalam model WarpPLS tingkat signifikansi koefisien jalur yang digunakan yaitu pada tingkat 1%, 5% dan 10%. Jika koefisien nilai jalur memiliki nilai *p-value* <0,01, *p-value* < 0,05 dan *P-value* < 0,1 maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat pengaruh yang signifikan diantara variabel. Namun sebaliknya jika koefisien jalur memiliki nilai *p-value* >0,01, *p-value* >0,05 dan *p-value* > 0,1 maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat pengaruh diantara variabel tetapi tidak signifikan.

## Pembahasan

### Pengujian

#### 1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

##### *Convergent Validity*

*Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor indikator dengan skor variabel latennya (*loading factor*) yang diukur dengan PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan variabel laten yang akan diukur. Tetapi menurut Chin (1998), dalam penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading factor* 0,5 sampai dengan

0,60 dianggap cukup baik. Dalam penelitian ini tahap awal *convergent validity* menunjukkan bahwa dari semua indikator memenuhi syarat *convergent validity*.

Selain itu, dalam penelitian ini untuk mengukur *convergent validity* dapat dilakukan dengan melihat hasil dari WarpPLS 7.0 pada bagian *Average Variance Extracted (AVE)*. Pengukuran AVE ini menggambarkan varian atau keragaman variabel manifest yang dapat dikandung oleh variabel laten. Kriteria penilaiannya adalah nilai  $AVE > 0,5$  (Hair, *et. al*, 2011). Tabel berikut dibawah ini merupakan hasil AVE setiap variabel laten:

Tabel 1. Nilai AVE

<i>Average Variances Extracted (AVE)</i>				
X1	X2	X3	Y1	Y2
0.754	0.714	0.788	0.811	0.825

Sumber : Hasil Output WarpPLS 7.0 yang telah diolah (2020)

Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai AVE untuk konstruk Sistem Pengendalian internal sebesar 0.754, konstruk partisipasi masyarakat sebesar 0.714, konstruk kompetensi aparatur 0.788, konstruk Akuntabilitas 0.811, konstruk pencegahan fraud 0.825. Hasil dari konstruk -konstruk tersebut menunjukkan bahwa nilai AVE dari semua konstruk yang dihasilkan lebih besar dari 0.5. Berdasarkan kriteria AVE, hasil tersebut telah menunjukkan *convergent validity* yang dikatakan baik.

### Composite Realibility

Tabel 2 Latent Variable Coefficients

	X1	X2	X3	Y1	Y2
<b>Composite Realibility</b>	0.886	0.806	0.890	0.920	0.895
<b>Cronbach's Alpha</b>	0.843	0.678	0.845	0.895	0.842

Sumber : Hasil Output WarpPLS 7.0 yang telah diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas, hasil menunjukkan *composite realibility* yang memuaskan dari masing-masing konstruk, yaitu: sistem pengendalian internal sebesar (0.886), partisipasi masyarakat (0.806), kompetensi aparatur (0.890), akuntabilitas (0,920) dan pencegahan fraud. sebesar (0.895). Hasil dari *Cronbach's Alpha* juga menunjukkan hasil yang baik, yaitu sistem pengendalian internal sebesar (0.843), partisipasi masyarakat (0.678), kompetensi aparatur (0.845), akuntabilitas (0,895) dan pencegahan fraud sebesar (0.842). Dapat disimpulkan bahwa masing - masing konstruk memiliki *realibility* yang tinggi dimana hal ini dapat dilihat dari nilai *composite realibility* dan *cronbach's alpha* seluruh konstruk lebih besar dari 0.70.

## 2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Uji *model fit* ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada uji kecocokan model (*model fit*) ini, terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient (APC)*, *average R – squared (ARS)*, dan *average variances factor*

(AVIF) dengan kriteria APC dan ARS diterima dengan syarat  $p - value < 0.1$  dan AVIF lebih kecil dari 5. Berikut adalah hasil output *model fit indices* dari program *WarpPLS 7.0* :

Tabel 3 *Model Fit Indices*

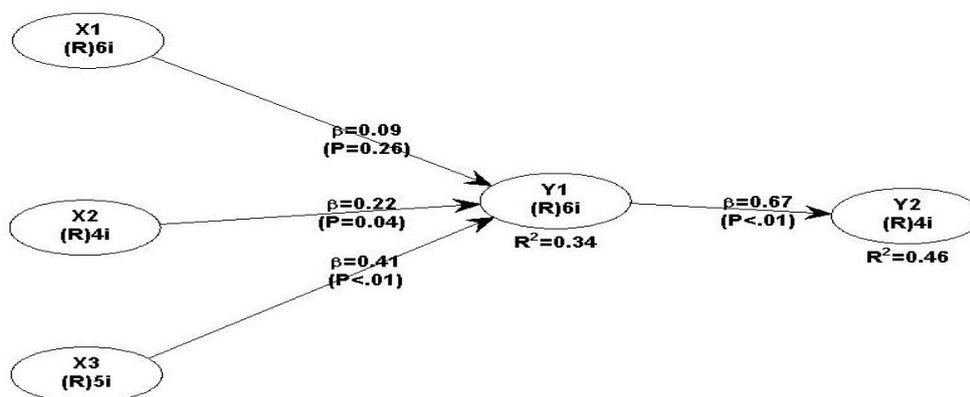
	Indeks	<i>p- value</i>
APC	0.347	$P < 0.002$
ARS	0.389	$P < 0.001$
AVIF	1.345 (acceptable if $\leq 5$ , Idealy $\leq 3,3$ )	$P < 0.001$

Sumber : Hasil Output *WarpPLS 7.0* yang telah diolah (2020)

Hasil output diatas, menjelaskan bahwa APC memiliki indeks sebesar 0.347 dengan nilai  $p - value < 0.002$ . Sedangkan ARS memiliki indeks sebesar 0.389 dengan  $p - value < 0.001$ .  $P - value$  kedua indeks menunjukkan hasil dibawah 0.1 yang berarti memenuhi kriteria APC dan ARS. AVIF juga menunjukkan indeks sebesar 1.345 yang berarti diterima karena indeks dibawah 5 dan ideal karena dibawah 3,3 maka model tidak mengandung multikolinearitas. Kesimpulannya adalah model sudah *fit* dengan data sehingga dapat melanjutkan pengujian berikutnya. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat memenuhi kriteria dan bisa digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap varabel dependen.

### 3. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *WarpPLS 7.0* ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian seluruh hipotesis akan dianalisis berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4. Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	P-value	Prediksi	Temuan
H1	SPI --> AB	0.087	0.261	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
H2	PM--> AB	0.221	0.045	Berpengaruh	Berpengaruh
H3	KA --> AB	0.408	<0.001	Berpengaruh	Berpengaruh
H4	AB--> PF	0.675	<0,001	Berpengaruh	Berpengaruh

Sumber : Hasil *output* WarpPLS 7.0 yang telah diolah (2020)

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0,087 dengan *p-value* 0.261. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yesinia (2018) dan Islamiyah (2020) yang menyatakan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.221 dengan *p-value* <0.045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan.. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Naimah (2016) dan Kurniawan (2018).

Berdasarkan Hasil analisis pada Tabel 4. menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.408 dengan *p-value* <0.001. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Wonar (2018) yang menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas dana desa. Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Anto dan Amir, 2017).

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap Pencegahan fraud. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* sebesar 0.675 dengan *p-value* <0.001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dampaknya pada pencegahan fraud. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel sistem pengendalian

internal(X1), partisipasi masyarakat (X2) dan kompetensi aparatur (X3), sedangkan untuk variabel terikat yang digunakan adalah akuntabilitas (Y1) dan pencegahan fraud (Y2). Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan, pada hakikatnya pemerintahan desa merupakan daerah otonom sehingga belum memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya untuk menciptakan *Good Governance* diperlukan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan kontribusinya dalam penyusunan APBDes. Dengan adanya kontribusi atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes maka akan semakin terarah dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat aktif dalam menggerakkan program kegiatan. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin tinggi. akuntabilitas manusia berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sama artinya dengan akuntabilitas dibutuhkan untuk mencegah segala kecurangan di Pemerintahan Desa dalam mengelola dana desa.

#### Daftar Pustaka

- Abdillah, W., Hartono. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Atmadja, & Saputra. (2017). *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Anto, R. P., & Amir, M. (2017). *Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia*. IOSR Journal of Business and Management Ver. VII, 19(11)
- Aziiz, Muhammad Nur Dan Sawitri Dwi Prastiti (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Aktual
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba Dan Gayatri (2019). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Metode Dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 5.0 (Third)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-dana-desa-2015-2020> 1565947501.  
Diakses pada tanggal 07 mei 2020
- Indonesia Corruption Watch (ICW).2019. *kasus korupsi dana desa terbanyak muncul pada 2019* diakses tanggal 18 Mei 2020 melalui <https://nasioanl.kompas.com>
- Islamiyah, Faridatul (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak*, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 8(1).

- Kurniawan, Dendy Taufiq (2018). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Lamongan)*.
- Naimah. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kabupaten Serdang Bedagi*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 01, 54-59.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rahayu, Dwi Dkk (2018). *Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan (2019). *Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widiyarta, Herawati, & Atmadja. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)*
- Wijaya, Sujana, & Purnamawati. (2017). *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Gerokgak*.
- Wonar, Klara Dkk (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Akuntansi, Audit & Aset
- Yesinia, Nur Ida Dkk (2018). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Aset (Akuntansi Riset)